

# **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NO 16 TAHUN 2002 TENTANG PENERTIBAN DAN PENANGGULANNGAN GELANDANGAN PENGEMIS DAN ANAK JALANAN(Studi Tentang Penanggulangan Anak Jalanan Di Kota Samarinda)**

**Nurhalia Windari**

## ***Abstrak***

*Nurhalia Windari. fakultas ilmu social dan ilmu politik universitas mulawarman dengan judulImplementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Penertiban dan Penanggulangan Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan (Studi tentang Penanggulangan Anak Jalanan Di Kota Samarinda), di bawah bimbingan Drs. Endang Erawan, M.Si selaku pembimbing I dan Drs. H. Hamdan M.Si selaku pembimbing II.*

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perda Kota Samarinda Nomor 16 Tahun 2002 terutama dalam hal penanggulangan anak jalanan di kota samarinda.dengan focus penelitian yang meliputi Bimbingan Sosial, Pelatihan Keterampilan, Bantuan modal usaha, dan bantuan pendidikan formal/nonformal serta faktor penghambat dan pendukung.*

*Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif.Teknik pengumpulan data dilakukan penelitian kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (Field Work Research) yaitu observasi wawancara (Interview) Langsung dengan Key Informan, Informan, dan dokumentasi.Analisis data yang digunakan ialah analisis data Model Interaktif Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 16 Tahun 2002 terutama dalam hal penanggulangan anak jalanan yang di laksanakan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda belum berjalan dengan maksimal. Anak-anak jalanan yang telah terjaring razia dan di berikan penyuluhan ataupun pembinaan mental justru malah kembali lagi kejalan dan tidak merasa jera. Selain itu kendala yang di hadapi dalam penanggulangan anak jalanan di Kota Samarinda adalah ketersediaan anggaran oleh pemerintah Kota Samarinda serta kurang nya kesadaran dari masyarakat untuk tidak memberikan belas kasihan kepada*

---

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, Email: Nurhalia82@gmail.com

*anak-anak jalanan tersebut sehingga penanggulangan anak jalanan masih belum berjalan secara maksimal.*

**Kata Kunci:** *Implementasi, Peraturan Daerah kota Samarinda Nomor 16 Tahun 2002, penanggulangan anak jalanan.*

## **Pendahuluan**

### ***Latar Belakang Penelitian***

Anak jalanan sebagai suatu masalah sosial kemasyarakatan khususnya masyarakat perkotaan. Dalam pandangan para pakar maupun organisasi dan departemen terkait belum memiliki suatu kesamaan pendapat maupun definisi yang seragam bagi hal tersebut. Dalam bab 1 ketentuan umum pasal 1 perda kota samarinda No. 16 Tahun 2002, anak jalanan di definisikan sebagai orang-orang atau anak manusia dengan batasan umur 19 tahun kebawah yang melakukan aktivitasnya di samping-samping jalan atau di jalan-jalan umum dalam wilayah kota samarinda dalam tujuan untuk meminta-minta uang baik kehendaknya sendiri, kelompok, dan atau di suruh orang lain kepada setiap pengemudi atau penumpang kendaraan bermotor, yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

Banyak nya Anak jalanan yang berkeliaran di Tiap-tiap Lampu jalanan (*traffic light*) sangat mengganggu ketertiban umum dan meresahkan warga pengguna jalanan di Kota Samarinda. Bahkan sebagian dari mereka berani merengsek menarik baju pengguna kendaraan Roda 2 dan mengetuk kaca mobil yang kebetulan berhenti pada Lampu jalanan tersebut untuk meminta-minta. Anak jalanan juga semakin bervariasi jenis nya. hal ini juga yang menarik minat penulis dalam meneliti penanggulangan terhadap anak jalanan di Kota Samarinda.

Terkait pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 tersebut peran Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda dalam pemberdayaan anak jalanan di Kota Samarinda, diharapkan tidak bersifat teknis semata, namun juga dari sisi kemanusiaan. Penanggulangan permasalahan anak jalanan belum sepenuhnya efektif. Pemerintah khususnya Dinas Kesejahteraan Sosial Samarinda hanya terfokus pada anak jalanan yang berada di panti sosial saja namun masih banyak anak-anak jalanan yang berada di luar panti sosial yang belum mendapat perhatian serta minimnya usaha pemerinta dalam hal pencegahan timbulnya anak jalanan dengan pemberdayaan keluarga.

Pada kenyataannya, sejak perda tersebut diberlakukan mulai pada tahun 2002 hingga tahun 2015, jumlah anak jalanan masih sulit dikendalikan. Jika terus dibiarkan, maka akan menimbulkan masalah sosial yang lebih besar lagi, dan pencitraan yang buruk terhadap kinerja Pemerintah Kota Samarinda. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya perbaikan dan peningkatkan oleh pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan yang

telah dibuat untuk kemudian di evaluasi agar permasalahan sosial yang kompleks dan cukup krusial ini dapat segera di temukan jalan keluarnya.

Berdasarkan latar belakang diatas dan pengamatan sementara di lapangan menimbulkan keinginan penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut, secara khusus mengenai **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 16 Th. 2002 Tentang Penertiban dan Penanggulangan Gelandangan Pengemis dan anak jalanan di Kota Samarinda ( Studi Tentang Penanggulangan Anak jalanan di Kota Samarinda)”**.

### ***Tujuan Penelitian***

Sebagai suatu karya ilmiah maka tentunya ada tujuan yang penulis harapkan dalam penulisan skripsi ini.yaitu:

1. Untuk menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 16 Tahun 2002 Terutama dalam hal Penanggulangan anak jalanan di Kota Samarinda.
2. Untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 16 Tahun 2002 tentang Penanggulangan Anak jalanan Dikota Samarinda.

### ***Manfaat Penelitian***

1. Dari Segi teoritis Diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dalam bidang Administrasi Negara secara khusus.Tambahan wawasan serta pengetahuan dan kemampuan untuk membuat karya ilmiah bagi penulis.
2. Dari Segi praktis:Sebagai bahan masukan bagi semua pihak terkait khususnya pemerintah kota Samarinda sebagai dasar untuk program penertiban dan penanggulangan gelandangan, pengemis dan anak jalanan. Serta Sebagai tambahan informasi bagi semua pihak baik pemerintah, kalangan akademik atau mahasiswa yang tertarik pada masalah yang diteliti

### ***Kerangka Dasar Tori***

#### ***Teori Dan Konsep***

#### ***Kebijakan Publik***

kebijakan publik sebagai “semua pilihan atau tindakan yang di lakukan oleh pemerintah”. kebijakan publik itu menyangkut pilihan-pilihan apapun yang di lakukan oleh pemerintah, baik untuk melakukan sesuatu ataupun untuk tidak berbuat sesuatu. (Thomas R. Dye dalam Wahab, 2008:51).

Berdasarkan uraian di atas, kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan dan umumnya tujuan tersebut ingin di capai oleh seseorang, kelompok, ataupun pemerintah.

### ***Implementasi Kebijakan***

Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. (silichn abdul wahab 2005:68).

Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif bagi anggota-anggota masyarakat harus sesuai dengan apa yang di inginkan oleh pemerintah atau negara, sehingga apabila perilaku atau perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara maka suatu kebijakan publik tidaklah efektif

### ***Gelandangan***

Gelandangan menurut Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 16 Tahun 2002 adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat dan tempat tinggal tidak menetap serta mengembara di tempat umum.

Dapat Disimpulkan bahwa Gelandangan adalah orang-orang yang hidup berkeliaran tidak menetap, tidak memiliki tempat tinggal, hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma masyarakat dan mengganggu ketertiban umum.

### ***Pengemis***

Pengemis menurut Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 16 tahun 2002, adalah orang-orang yang melakukan aktivitasnya dengan meminta-minta di depan umum atau di badan jalan dan atau di simpang-simpang jalan dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain dan dapat mengganggu ketertiban umum.

Dapat Disimpulkan bahwa Pengemis adalah orang-orang yang melakukan aktivitas meminta-minta di depan umum dengan berbagai cara dan alasan untuk meminta belas kasihan orang lain.

### ***Anak jalanan***

anak jalanan adalah anak-anak yang tersisih, marginal, dan teralienasi dari perlakuan kasih sayang karena kebanyakan dalam usia yang relatif dini sudah harus berhadapan dengan lingkungan kota keras, bahkan tidak bersahabat. Marginal karena mereka melakukan jenis pekerjaan yang tidak jelas jenjang karirnya, kurang dihargai, dan pada umumnya juga tidak menjanjikan prospek apapun di masa depan. (Bagong Suyanto 2010: 185).

Jadi dapat disimpulkan anak jalanan adalah seseorang yang berusia dibawah 18 tahun yang beraktivitas di jalanan untuk mencari nafkah yang dimana masyarakat beranggapan bahwa dapat mengganggu ketertiban umum.

### ***Penanggulangan Anak Jalanan***

Adapun Penanggulangan anak jalanan Menurut Rencana Kerja yang disusun oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda Tahun 2015 terdiri dari :

1. Bimbingan Sosial
2. Pembinaan Mental Sosial
3. Pembinaan dalam Pendidikan formal dan Nonformal
4. Pelatihan Keterampilan dan Kemampuan Permodalan.

### ***Definisi Konsepsional***

Implementasi Kebijakan merupakan suatu pelaksanaan suatu kebijakan yang di usulkan pemerintah yang telah di tetapkan atau di setuju untuk mencapai tujuan tertentu dengan penggunaan sarana (alat) dalam hal ini kantor Dinas Sosial Kota Samarinda berusaha untuk menanggulangi anak jalanan melalui berbagai mekanisme penanganan dalam pemberian Bimbingan sosial, pemberian pelatihan keterampilan, pemberian sarana dan prasarana dalam pengembangan pendidikan formal/nonformal dan tindakan-tindakan penanggulangan lain nya dan mendapatkan respon yang baik bagi anak-anak jalanan untuk kebutuhan mereka sehingga dapat meminimalisasikan keberadaan mereka di jalanan.

### **Metode Penelitian**

#### ***Jenis Penelitian***

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang memaparkan, menggambarkan, menjelaskan, mengklasifikasikan dan menganalisis variable-variabel yang diteliti.

#### ***Fokus Penelitian***

indikator-indikator yang akan diselidiki oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Penanggulangan Anak Jalanan
  - a. Bentuk Bimbingan sosial
  - b. Bentuk Pelatihan Keterampilan
  - c. Pemberian bantuan Modal usaha
  - d. Bentuk Pendidikan formal/ nonformal
2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 16 Tahun 2002 terutama dalam hal Penanggulangan Anak Jalanan di Kota Samarinda.

#### ***Lokasi Penelitian***

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda dan beberapa perempatan jalan yaitu Jl. Basuki Rahmat, Jl. Mall Lembuswana dan Jl. Antasari

#### ***Sumber dan Jenis Data***

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, menurut Sugiono (2014:62), yaitu :

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau ada hubungannya dengan objek melalui Tanya jawab atau wawancara secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara sesuai dengan fokus penelitian yang penulis teliti. Adapun sumber data yakni *Key Informan* dan *Informan* dipandu dengan pertanyaan yang sesuai dengan fokus penelitian yang ditentukan oleh peneliti secara langsung.
2. Data Sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data asli. Penulis peroleh melalui sumber informan, yakni :
  - a. Dokumen-dokumen, arsip-arsip, dan laporan-laporan
  - b. Buku-buku referensi yang terdapat diperpustakaan sesuai dengan fokus penelitian.

### ***Teknik Pengumpulan Data***

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

- 1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).
- 2) Penelitian lapangan (*Field Work Research*). Adapun cara pengumpulan data dilapangan digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :
  - a. Observasi.
  - b. Wawancara.
  - c. Dokumentasi.

### ***Teknis Analisis Data***

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini analisis data model interaktif (Miles dan Huberman terjemahan dalam Sugiyono2014:405).yang meliputi empat komponen sebagai berikut :

1. *Data collection* (Pengumpulan data)
2. *Data reduction* (Reduksi data)
3. *Data display* ( Penyajian data)
4. *Conclusions : drawing/verying* ( Penarikan kesimpulan/verifikasi kesimpulan)

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### ***Gambaran Umum Lokasi Penelitian***

#### ***Lokasi Tempat Penelitian***

Samarinda terletak di wilayah khatulistiwa dengan koordinat diantara 0°21'81"-1°09'16"15'16"-117°24'16" BT dengan luas wilayah 718 km<sup>2</sup>. Kota Samarinda memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Utara : Kecamatan Muara Badak, Kutai Kartanegara
- Selatan : Kecamatan Loa Janan, Kutai Kartanegara
- Barat : Kecamatan Tenggarong Seberang dan Muara Badak di Kabupaten Kutai Kartanegara

- Timur : Kecamatan Muara Badak, Anggana dan Sanga-sanga di Kabupaten Kutai Kartanegara

Kota Samarinda beriklim tropis basah, hujan sepanjang tahun. Temperatur udara antara 20° C - 34° C dengan curah hujan rata-rata per tahun 1980 mm. Sedangkan kelembaban udara rata-rata 85%.

#### ***Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda***

Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda merupakan unsur pelaksana pemerintah di bidang kesejahteraan sosial yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Dibentuk berdasarkan peraturan daerah kota samarinda nomor 11 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja dinas daerah kota samarinda.

#### ***Sasaran***

Sasaran pembangunan kesejahteraan sosial adalah memberikan pembinaan dan pengembangan baik dalam bentuk penyuluh sosial, pelatihan keterampilan, praktek belajar kerja dan pemberian bantuan sosial dengan mengutamakan pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang meliputi :

1. Anak Balita Terlantar.
2. Anak Terlantar
3. Anak Nakal
4. Anak Jalanan
5. Wanita Rawan Sosial Ekonomi
6. Korban Tindak Kekerasan.
7. Lanjut Usia Terlantar.
8. Penyandang cacat
9. Tuna Susila
10. Pengemis
11. Gelandangan
12. Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan
13. Korban Penyalagunaan NAPZA
14. Keluarga Fakir Miskin
15. Keluarga Berumah Tidak Layak Huni
16. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
17. Korban Bencana Alam
18. Korban Bencana Sosial atau Pengungsi
19. Pekerja Migran Terlantar
20. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)

#### ***Hasil Penelitian***

#### ***Bimbingan Sosial***

Program bimbingan social yang di laksanakan oleh dinas kesejahteraan social Kota Samarinda biasa nya di berikan kepada para anak jalanan dan orang tua dari anak jalanan yang telah terjaring razia. Bimbingan social di berikan dengan cara memberikan arahan-arahan tentang peraturan yang melarang untuk anak-anak yang mengamen, mengemis, berjualan dan berkeliaran di jalan. Selain mengganggu ketertiban umum kegiatan tersebut dapat membahayakan nyawa mereka. Selain itu pa orang tua anak jalanan juga di berikan bimbingan yang berupa arahan untuk melarang anak mereka kembali berkegiatan di jalan.

#### ***Bentuk pelatihan dan keterampilan***

Pemberian peletihan keterampilan di laksanakan di tiap-tiap panti social yang bekerja sama dengan pihak Dinas kesejahteraan social kota samarinda. Pelatihan keterampilan hanya di berikan kepada anak jalanan yang telah berusia 17 tahun keatas. Program-program pelatihan keterampilan terdiri dari pelatihan otomotif, memasak, menjahit, serta tatarias. Namun program pelatihan keterampilan tersebut berjalan sesuai program pada tiap-tiap panti social.

#### ***Pemberian bantuan modal usaha***

Berdasarkan keterangan diatas kelompok anak jalanan yang mengajukan bantuan modal usaha di beri tanggung jwab atas usaha yang mereka jalankan dengan membuat laporan usaha per triwulan. Selain itu tidak banyak anak jalanan yang mengetahui ada nya bantuan modal usaha tersebut. Pihak kesejahteraan social kota samarinda melalui tenaga relawan selalu memonitor kegiatan usaha yang mereka jalankan tersebut.

#### ***Bentuk Pendidikan formal/nonformal***

Pemberian bantuan pendikan secara formal dan non formal masih belum berjalan seperti yang di inginkan, pihak dinas kesejahteraan social telah melakukan kerja sama dengan beberapa pihak panti social namun kemauan atau minan anak jalanan yang mash sangat minim menjadikan program ini belum berjalan sebagai mertinya yang telah di harapkan

#### ***Faktor pendukung dan faktor penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 16 Tahun 2002 terutama dalam hal penanggulangan Anak Jalanan Di Kota Samarinda.***

Adapun faktor pendukung dan penghambat tersebut diantaranya adalah :

- a) Faktor pendukung
  - 1) Adanya peran serta pemerintah Kota Samarinda, panti swasta, serta Instansi Terkait dalam penanggulangan anak jalanan.
  - 2) Kepedulian masyarakat dalam pemberian informasi tentang keberadaan anak jalanan kepada dinas social kota samarinda.
- b) Faktor Penghambat
  - 1) Keterbatasan anggaran adalah hambatan yang paling mendasar dalam program pennggulangan anak jalanan di Kota Samarinda.



- 2) Sumberdaya Manusia yang kurang memadai juga menjadi hambatan dalam program penanggulangan anak jalanan. Kurang nya Sumber Daya Manusia Menyebabkan pemberian pembinaan mental tidak berjalan dengan maksimal.
- 3) Kurang nya kesadaran para orang tua untuk tidak membiarkan anaknya kembali berkeliaran dan mencari nafkah di pinggir jalan juga menjadi hambatan dalam menekan laju pertumbuhan anak jalanan di Kota Samarinda.
- 4) Selain menjadi pendukung, masyarakat juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam penanggulangan anak jalanan. Kurang nya pemahaman masyarakat untyk tidak memberikan uang ataupun memebli dagangan yang anak jalanan jajakan juga menjadi faktor penghambat dalam menanganin permasalahan anak jalanan di Kota Samarinda. Dengan memberikan uang ataupun membeli semangat yang mereka jajakan justru memberikan harapan serta pemahaman kepada mereka untuk tetap bekerja ataupun mencari nafkah di pinggir jalan.

### ***Pembahasan***

#### ***Bimbingan Sosial***

Bimbingan social adalah kegiatan pemberian arahan atau ceramah berupa motivasi-motivasi kepada anak jalanan agar mau tidak melakukan kegiatan meminta-minta maupun aktivitas lainnya yang dapat m,engancam keselamatanjiwa mereka. Untuk teknis operasionalnya sendiri tidak ada jadi bimbingan social hanya dilakukan atas inisiatif pihak dinas kesejahteraan social kota samarinda. kegiatan ini tidak di tentukan kapan waktu pelaksanaannya, karena dinas kesejahteraan social bergantung pada razia satpol pp dan ketersediaan anggaran kegiatan. Efektifitas kegiatan bimbingan social yang di laksanakan oleh dinas kesejahteraan social ini dirasa masih kurang berjalan efektif karena anak jalanan tersebut masih saja melakukan aktivitas mereka dijalan setelah terjaring razia dan diberikan bimbingan social oleh dinas kesejahteraan social kota Samarinda.

#### ***Pelatihan keterampilan***

Pelatihan keterampilan guna menambah skill anak jalanan, pelatihan yang dimaksud adalah otomotif, salon, menjahit, dan tata rias. Pelatihan dan keterampilan adalah langkah selanjutnya dari bimbingan social yang dilakukan oleh dinas kesejahteraan social kota samarinda dalam menangani masalah anak jalanan di wilayah kota samarinda, setelah di lakukan bimbingan social maka hanya anak jalanan yang ingin atau telah tinggal di panti social provinsi akan di berikan pelatihan dan keterampilan. Dalam pelaksanaan peletihan

keterampilan belum berjalan dengan efektif, kurangnya minat anak jalanan dan juga seringkali terbentur oleh ketersediaan dana menjadikan pelatihan ini belum berjalan dengan maksimal.

### ***Pemberian bantuan modal usaha***

Dinas kesejahteraan social kota samarinda memiliki kebijakan pemberian bantuan modal usaha kepada anak jalanan. Untuk kegiatan pemberia bantuan kepada anak jalann usia remaja ini terdapat syarat-syarat yang harus di penuhi seperti surat keterangan tidak mampu dari RT dan diketahui oleh lurah dimana mereka tinggal serta harus mampu mengembangkan usaha, selain anak jalanan tersebut harus membentuk kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari lima (5) orang. Mereka wajib membuat laporan usaha per triwulan kepada dinas kesejahteraan social kota samarinda. La[poran per triwulan di kumpul kan tujuan nya untuk mengetahui perkembangan usaha mereka. Dinas kesejahteraan social kota samarinda juga memantau usaha mereka melalui relawan. Apabila diketahui usaha mereka tidak berkembang maka dinas social kota samarinda berhak mengalihkan usaha kepada kelompok anak jalanan lain nya yang lebih membutuhkan.

### ***Bentuk pendidikan formal/nonformal***

Dinas kesejahteraan social merujuk pada panti social anak harapan untuk pendidikan formal dan panti social bina remaja untuk pendidikan nonformal. Pendidikan formal/nonformal di berikan tujuan nya untuk mengembalikan hak anak usia 17 tahun kebawah yakni mengenyam pendidikan seperti program yang telah di tetapkan oleh pemerintah. Berjalan nya program pembrian bantuan pendidikan untuk anak jalanan ini masih terhalang dengan minat anak jalanan untuk kembali bersekolah. Meskipun pembinaan mental telah di lakukan untuk memberikan pengertian bahwa mereka harus mengenyam pendidikan, tetapi mereka masih saja tidak mau kembali bersekolah. Hal ini menjadi hambatan terbesar dalam program bantuan pendidikan bagi anak jalanan. Sebagian besar dari mereka justru merasa nyaman dengan tidak adanya aturan dan pendidikan dalam keseharian mereka.

### ***Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian tentang Studi Tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Samarinda nomor 16 Tahun 2002 tentang penertiban dan penanggulangan gelandangan pengemis dan anak jalanan (studi tentang penanggulangan Anak Jalanan di Kota Samarinda) maka pada bab ini dapat diambil garis besar sebagai berikut:

#### **1. Bimbingan Sosial**

Dalam hal Bimbingan sosial yang telah di lakukan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda masih terlaksana dengan sangat buruk. Anak jalanan hanya di berikan penyuluhan sebatas bahaya nya berada di jalan, dan penting nya pendidikan yang di berikan secara

singkat. Hal ini terjadi karena masih kurangnya pemerintah Kota Samarinda dalam menangani anak jalanan. Selain itu bimbingan sosial yang diberikan melalui penyuluhan singkat ini juga sama sekali tidak memotivasi anak jalanan untuk tidak turun ke jalan lagi, dan justru membuat jumlah anak jalanan makin meningkat pada tiap tahunnya.

2. Pelatihan dan keterampilan

Kebijakan pemerintah dalam memberikan program pelatihan keterampilan juga masih berjalan dengan tidak maksimal. Pemerintah hanya menyediakan program pelatihan pada panti sosial provinsi. Sedangkan untuk anak-anak yang tidak masuk pada panti tersebut sama sekali tidak pernah diberikan program pelatihan apapun. Anak jalanan yang tertangkap hanya diproses selama satu malam setelah itu dikeluarkan tanpa diberikan bekal kemampuan lain.

3. Bantuan modal usaha

Pemerintah Kota Samarinda saat ini telah mampu memberikan bantuan permodalan dengan cukup baik, namun yang disayangkan bantuan tersebut tidaklah merata dan tidak dibarengi dengan bimbingan dalam menjalankan usaha sehingga tidak sedikit dari mereka yang telah diberikan bantuan permodalan dan mengalami kegagalan dalam usaha, justru kembali lagi ke jalan. Mereka hanya dimonitor dalam menjalankan usaha, sedangkan anak jalanan sendiri belum memiliki kemampuan usaha yang cukup baik. Hal ini mengakibatkan pemberian modal usaha tidak berjalan dengan efektif dalam membantu pemerintah Kota Samarinda untuk menanggulangi permasalahan anak jalanan yang semakin hari semakin bertambah jumlahnya.

4. Pendidikan Formal/non formal

Dalam kebijakan pemerintah Kota Samarinda untuk memberikan bantuan pendidikan formal/non formal kepada anak jalanan yang dibantu oleh beberapa Panti sosial maupun panti swasta se-Kota Samarinda telah berjalan dengan cukup baik namun program ini belum berjalan secara merata. Di karenakan kurangnya keseriusan dari Dinas Kesejahteraan sosial dalam menangani masalah anak jalanan yang ada di Kota Samarinda. Hal ini juga berkaitan dengan tingginya angka putus sekolah di daerah Kota Samarinda. Dari hasil wawancara penulis dengan pihak Dinas Kesejahteraan sosial mendapatkan bahwa Hanya anak jalanan yang bersedia tinggal di panti saja yang akan mendapatkan bantuan pendidikan formal/nonformal. Bagi anak jalanan yang tidak bersedia tinggal di panti tidak mendapatkan bantuan pendidikan formal/nonformal.

5. Faktor penghambat dan pendukung dalam proses penanggulangan anak jalanan yang dilakukan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda

- a) Faktor Pendukung
  - 1) Adanya panti-panti swasta yang bersedia untuk membantu menampung dan mendidik anak jalanan yang bersedia tinggal di panti dan mau melanjutkan sekolahnya lagi.
  - 2) Kepedulian Masyarakat untuk memberikan informasi tentang keberadaan anak jalanan kepada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda.
- b) Faktor penghambat
  - 1) Anggaran yang kurang mencukupi.
  - 2) Sumber daya Manusia yang kurang memadai.
  - 3) Kesadaran para orang tua untuk tidak membiarkan anak nya berkeliaran dan mencari nafkah di jalanan
  - 4) Kesadaran masyarakat untuk tidak merasa iba dan memberikan uang ataupun membeli dagangan pada anak jalanan.

### **Saran**

Adapun saran yang dapat penulis kemukakan sebagai bahan masukan untuk lebih meningkatkan mutu dan manfaat dari penelitian serta bagi Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda diantaranya sebagai berikut:

1. Diharapkan Pemerintah Kota Samarinda menambah jumlah SDM pada Pnti social yang telah di sediakan agar panti tersebut dapat di pergunakan sebagaimana petunjuk pelaksana penanggulangan Oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda.
2. Diharapkan sebaiknya pemerintah memberikan hukuman yang memberikan efek jera kepada para orang tua kandung ataupun orang tua asuh yang dengan sadar dan sengaja memperkerjakan anak-anak usia dini, yang dengan sadar dan sengaja melepas anak-anak nya untuk berkeliaran mencari nafkah di badan-badan jalan atau yang kita sebut sebagai anak jalanan.
3. Di harapkan pemerintah kota samarinda memberikan tempat atau suatu wadah kreativitas bagi anak jalanan untuk membuat suatu kreasi,, yang kemudian kreasi-kreasi yang di hasilkan oleh anak jalanan tersebut di jual di pasar dan hasilnya untuk membantu biaya pendidikan mereka agar mereka tidak kembali bekerja di jalan lagi.
4. Di harapkan pemerintah kota samarinda memberikan himbauan atau bahkan sanksi tegas dan peraturan bagi masyarakat kota samarinda yang memberikan uang atau pun membeli dagangan anak jalanan. Hal ini dapat memberikan efek jera keppada anak jalanan, jika tidak ada yang mamu memberikan uang ataupun membeli dagangan mereka maka mereka akan dengan sendirinya mereasa jenuh dan akan berhenti.

5. Diharapkan pemerintah kota samarinda untuk memaksimalkan panti-panti sosial yang masih belum berfungsi sebagaimana mestinya dalam usaha menanggulangi anak jalanan di Kota Samarinda.

***Daftar Pustaka***

Islamy, Irfan. 2002. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Cetakan 12. Jakarta: Bumi Aksara.

Miles, B. Matthew, A. Michael Huberman dan Johny Saldana, 2014, *Qualitative Data Analysis*. Edisi Ketiga. Sage publications, Inc.

Moleong, Lexy J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.

Nasucha, Chaizi. 2004. *Reformasi Administrasi Publik Teori Dan Praktek*. Jakarta: Grasindo

Nurhadjatmo, Wahyu. 1999, *Seksualitas Anak Jalanan*. Yogyakarta : Pusat Penelitian Kependudukan, UGM.

Odi, Salahudin. 2000. *Anak Jalanan Perempuan*, Semarang : Yayasan Setara.

Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta.

Soekanto, Soerjono, 2010. *Sosiologi : Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Pers.

Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung : PT. Refika Pratama.

Suharto, Edi. 2007. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta

Suyanto, Bagong. 2010. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta Kencana Prenada Media Group

Suyanto, Bagong dan Sri Hanututi Hariadi. 2002. *Krisis Child Abuse*. Surabaya : Airlangga University Press.

\_\_\_\_\_, 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta

\_\_\_\_\_. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Pressindo

**Dokumen-dokumen.**

Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 16 Tahun 2002 tentang penertiban dan penanggulangan pengemis, anak jalanan dan gelandangan.

Pemerintah Kota Samarinda, Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda.

Kamus Besar Bahasa Indonesia